

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transparansi dan akuntabilitas keuangan di Indonesia pada saat ini menjadi isu yang mendapat perhatian penting dikarenakan adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penyajian laporan keuangan adalah salah satu reformasi yang harus pemerintah lakukan agar transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat meningkat. Pemerintah harus menyediakan seluruh informasi keuangan secara jujur dan terbuka kepada masyarakat sebagaimana untuk melaksanakan amanat rakyat (Hehanussa, 2015).

Transparansi akan membuat orang-orang untuk dapat mengakses atau memiliki kebebasan untuk mendapat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah dalam hal informasi dalam kebijakan, pembuatan dan pelaksanaan kebijakan tersebut serta bagaimana hasil dari kebijakan tersebut. Transparansi memiliki arti lain yaitu keterbukaan sebuah organisasi untuk memberikan informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Mahmudi, 2010).

Transparansi adalah sebuah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang ada kaitannya dengan kegiatan pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang memerlukan informasi. Kewajiban dalam memberikan informasi keuangan harus dilakukan oleh pemerintah agar bisa digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan.

Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menyatakan informasi adalah pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta bagian penting dalam ketahanan nasional. Hak untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan public adalah salah satu ciri dari negara yang demokratis.

Transparansi bila dikaitkan dengan penyelenggaraan publik berarti kondisi dimana masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi dan dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan urusan-urusan publik. Peran pemerintah adalah membuka diri terhadap semua hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak adanya diskriminatif terhadap penyelenggaraan daerah (Kusuma, 2012).

Ketidakmampuan laporan keuangan untuk melaksanakan akuntabilitas tidak saja disebabkan oleh laporan tahunan yang tidak membuat semua informasi relevan, tetapi karena laporan tersebut tidak tersedia dan aksesibel pada pengguna potensial (Stecollini, 2002 dalam Chrystiana, 2017)

Akuntabilitas (*accountability*) adalah konsep lebih luas dari *stewardship*. Hal ini dikarenakan *stewardship* mengacu kepada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa ada beban kewajiban untuk melaporkan, sedangkan akuntabilitas itu sendiri akan mengacu kepada pertanggungjawaban oleh *steward* kepada pemberi tanggungjawab (Mardiasmo, 2002).

Adanya otonomi desa menyebabkan pemerintah harus memperhatikan prinsip akuntabilitas di level pemerintahan desa yang melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang ada kaitannya

dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksudkan adalah pertanggungjawaban masalah financial yang terdapat dalam APBDes dengan alokasi dana desa adalah salah satu komponen di dalamnya (Sukasmanto dalam Sumpeno, 2011).

Penyajian laporan keuangan daerah adalah salah satu faktor penting untuk menghasilkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus bisa mengaplikasikan laporan keuangan sesuai dengan standard akuntansi yang telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Penyajian sebuah informasi dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan dapat mewujudkan akuntabilitas (Nordiawan, 2010).

Unsur-unsur karakteristik kualitatif laporan keuangan dalam penyajiannya yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Penyusunan dari laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat untuk adanya akuntabilitas yang menjadi keterbukaan pemerintah atas semua kegiatan pengelolaan sumber daya public (Mardiasmo, 2006).

Aksesibilitas juga akan berpengaruh kepada transparansi dan akuntabilitas. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia aksesibilitas berarti hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat untuk mendapatkan informasi sangat penting untuk menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder* (Aliyah dan Nahar, 2012) . Pemerintah

daerah harus memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, tidak hanya kepada lembaga legislative dan badan pengawas tetapi juga kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan untuk mengelola dana publik (Lewier dan Kurniawan, 2016).

Apriliani *et.al.* (2015), menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan dan aksesibilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi laporan keuangan daerah baik secara simultan maupun parsial.

Chrystiana (2017), menyatakan bahwa penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas berpengaruh signifikan positif terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

Mustofa (2012), menyatakan bahwa penyajian dari laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, aksesibilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Lewier dan Kurniawan (2016) menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Sukhemi (2012), menyebutkan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan daerah dan pengungkapan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Chrystiana (2017), yang mana letak perbedaan dari penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada objek yaitu pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.

Pemerintahan desa yang terdapat di Kecamatan Baso, Kabupaten Agam adalah salah satu yang mempunyai kewajiban untuk menyajikan dan menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun dalam menyajikan laporan keuangan ini masih terdapat kendala dan masalah.

Permasalahannya adalah kurang transparansinya pemerintah dalam pengelolaan keuangan desa ketika penyusunan dana desa dan menyebabkan masyarakat di Kecamatan Baso Kabupaten Agam tidak mengetahui bagaimana realisasi dana desa yang telah diglontorkan oleh aparatur desa. Selain itu masyarakat di Kecamatan Baso Kabupaten Agam tidak mengetahui apa pentingnya diterapkannya akuntabilitas keuangan desa sehingga masyarakat tersebut tidak mengetahui bagaimana dana tersebut digunakan dan bagaimana proses pembelanjaan dana tersebut karena pemerintah tidak mengungkapkannya.

Kecamatan Baso Kabupaten Agam sudah memiliki *website* resmi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang diperlukan oleh masyarakat dan menjadi media penghubung antara masyarakat dan pemerintah, namun dalam hal pengaplikasian *website* tersebut belum memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai contoh belum adanya informasi mengenai laporan keuangan sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui bagaimana realisasi dari dana desa tersebut.

Ketidakmampuan sebuah laporan keuangan untuk melaksanakan akuntabilitas tidak hanya disebabkan oleh laporan yang tidak memuat semua informasi yang relevan, tetapi juga dikarenakan laporan tersebut tidak secara langsung tersedia dan aksesibel untuk para pengguna. Sehingga penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel akan menurunkan kualitas dari akuntabilitas.

Dari latar belakang masalah yang terdapat diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Baso Kabupaten Agam”. Dengan batasan masalah penelitian hanya terfokus kepada pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban dan aksesibilitas terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa, selanjutnya penelitian ini hanya dilakukan di desa-desa yang terdapat di Kecamatan Baso Kabupaten Agam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso
2. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baao
3. Apakah penyajian laporan pertanggungjawaban berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso

4. Apakah aksesibilitas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis :

1. Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso
2. Pengaruh aksesibilitas terhadap transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso.
3. Pengaruh penyajian laporan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso.
4. Pengaruh aksesibilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Baso.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak di antara lain ;

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menanbah wawasan tentang akuntabilitas dan transparansi alokasi dana desa bagi peneliti.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi.

3. Bagi Instansi

Memberi masukan kepada Pemerintahan di Kecamatan Baso dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai penulisan berikut :

Bab pertama tentang pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua tentang landasan teori dan pengembangan hipotesis. Isi dari landasan teori dan pengembangan hipotesis adalah teori-teori yang dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran dalam penelitian.

Bab ketiga adalah tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta teknik analisis data yang digunakan.

Bab empat adalah tentang pembahasan. Pembahasan ini berisi tentang gambaran umum desa penelitian, pengujian dan hasil analisis data serta pembahasan dari hasil analisis data.

Bab lima adalah penutup. Penutup dalam penelitian ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran.